

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN JANUARI 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan JANUARI 2023 terdapat 2 (dua) pengaduan dan pengaduan sudah kami tampung untuk diserahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Pengaduan masyarakat disampaikan melalui aplikasi whatsapp pada bulan Januari 2023 terlampir

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Januari	- Permohonan penertiban pedagang liar yang menjual di TPI - Laporan bahwa lampu selasar TPI mati	2 (dua) pengaduan	Melalui aplikasi whatsapp

IV. PENUTUP DAN SARAN

Pada bulan Januari 2023, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah menerima 2 (dua) laporan pengaduan dari Pengguna Jasa Pelabuhan. Pengaduan pertama dari pengguna jasa pada tanggal 17 Januari 2023 adanya pedagang liar yang menjual bukan produk perikanan di dalam Tempat Pemasaran Ikan PPS Bitung dan pada tanggal 18 Januari 2023 adanya laporan bahwa lampu selasar Tempat Pemasaran Ikan PPS Bitung padam, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Laporan pengaduan tersebut disampaikan oleh Pengguna Jasa Pelabuhan melalui aplikasi whatsapp, selain itu pengaduan juga dapat disampaikan pada Kotak Pengaduan atau langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang pengaduan public, pengaduan melalui media elektronik (email: pps.bitung34@gmail.com, Facebook: Humas_PPS Bitung, Twitter: @Humas_PPS Bitung, Instagram: ppsbitung202) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Bitung, 31 Januari 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Sub Pokja
Kesyahbandaran

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Ari Prasetyo, S.T

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
PADA BULAN JANUARI 2023

Pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 08.21 WITA diinfokan melalui Grup Whatsapp TERBAIK PPS Bitung terdapat laporan dari Pengguna Jasa bahwa adanya pedagang liar yang menjual bukan produk perikanan di dalam Tempat Pemasaran Ikan PPS Bitung. Pengaduan telah diterima dan disampaikan oleh Sub Bagian Umum serta langsung ditindaklanjuti.

Demikian laporan aduan yang kami sampaikan berharap mendapatkan solusi dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelapor,
Pengguna TPI Higenis

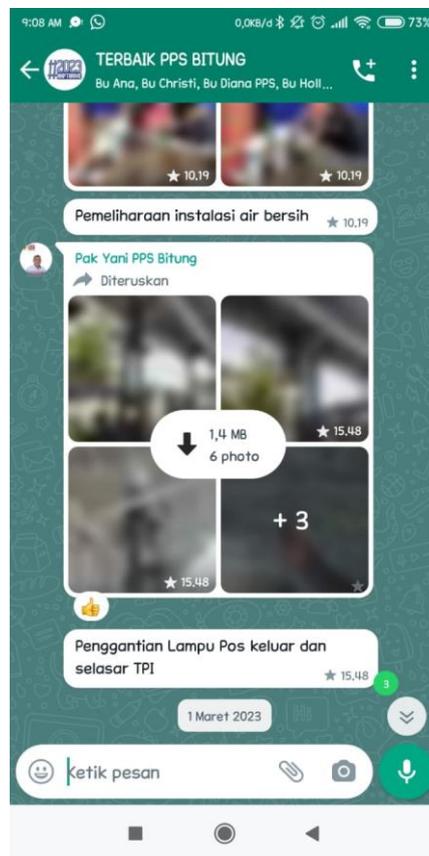
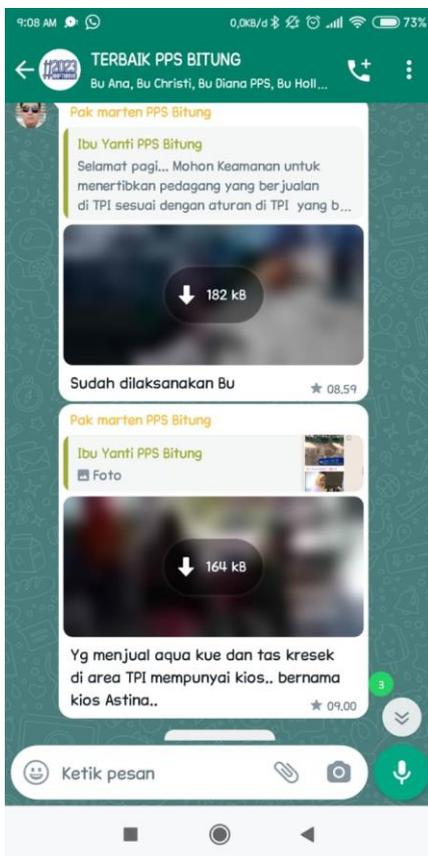
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
PADA BULAN JANUARI 2023

Pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 09.09 WITA diinfokan melalui Grup Whatsapp TERBAIK PPS Bitung terdapat laporan dari pengguna jasa bahwa lampu di selasar TPI padam, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Pengaduan telah diterima dan disampaikan oleh Sarana Prasarana dan langsung ditindaklanjuti.

Demikian laporan aduan yang kami sampaikan berharap mendapatkan solusi dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelapor,
Pengguna TPI Higenis

Lampiran Laporan Pengaduan



Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN FEBUARI 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya Negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan FEBUARI 2023 NIHIL dan tidak adanya pengaduan dalam bidang pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan dikategorikan "BAIK" dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengaduan Masyarakat disampaikan dengan cara Kotak Pengaduan, Pengaduan Langsung, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter : @Humas_PPS Bitung, Instagram : @Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terlampir. Berikut table pengaduan dan dokumen pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Februari 2023.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Februari	-	-	-

IV. PENUTUP DAN SARAN

Jumlah pengaduan (Pengaduan terkait administrasi pelayanan public dan pelayanan jasa kepelabuhanan) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Febuari 2023 adalah Nihil dan tidak terdapat Pengaduan Baik berupa pengaduan dalam bentuk tulisan /saran yang disampaikan pada kotak pengaduan, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter :@Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Bitung, 28 Febuari 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Sub Pokja
Kesyahbandaran

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Ari Prasetyo, S.T

Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

BULAN MARET 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDEARA BITUNG
2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi. Yang paling utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur tuntutan aspirasi reformasi, agar aparaturnya Negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan kewenangan kepada rakyat Indonesia sebagai pemenang kekuasaan tertinggi Negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penerapan pelaporan masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor KEP1/18/M/PAN/8/2004, tanggal 31 Agustus 2004, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

II. PERSONIL TIM TINDAK LANJUT DAN PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Christian Evendy Yani Muaja, S.IK Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua
2	Dola Mirantika Petma, A.Md Pranata Humas Pelaksana	Sekretaris
3	Marzel Hence Fityly Tumundo, A.Md AP3T Terampil	Anggota
4	Resti Priscilia Okem AP3T Pemula	Anggota
5	Ericer S. Titiheru, S.E Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan UPT

III. JUMLAH PENGADUAN DAN DOKUMEN PENGADUAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Dari hasil penanganan kegiatan pengaduan masyarakat selama bulan Maret 2023 NIHIL dan tidak adanya pengaduan dalam bidang pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan dikategorikan "BAIK" dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengaduan Masyarakat disampaikan dengan cara Kotak Pengaduan, Pengaduan Langsung, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter : @Humas_PPS Bitung, Instagram : @Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) terlampir. Berikut table pengaduan dan dokumen pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Maret 2023.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Maret	-	-	-

IV. PENUTUP DAN SARAN

Jumlah pengaduan (Pengaduan terkait administrasi pelayanan public dan pelayanan jasa kepelabuhanan) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Bulan Maret 2023 adalah Nihil dan tidak terdapat Pengaduan Baik berupa pengaduan dalam bentuk tulisan /saran yang disampaikan pada kotak pengaduan, langsung pada personil penerima pengaduan, Ruang Pengaduan Publik, Pengaduan Melalui Media Elektronik (Email : ppsppsbitung@yahoo, Facebook : @Humas_PPS Bitung, Twitter :@Humas_PPS Bitung,), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Bitung, 31 Maret 2023

Sub Pokja
Pelayanan Usaha

Sub Pokja
Kesyahbandaran

Kodrat Twin Riskiyanti, SH., MH

Ari Prasetyo, S.T

Lampiran:



Lokasi Kotak Pengaduan : Kantor Utama PPS Bitung



Pengaduan Melalui Media Elektronik: Facebook Humas_PPS Bitung

 **Humas PPS Bitung**
@Humas_PpsBitung

Komik "siBitung" Edisi ke XV Terbit lagi nih #SahabatBahari Tentang Penanganan Pengaduan lingkup Unit Pelaksana Teknis PPS Bitung dan data penanganan pengaduan.
#DJPTBersinergi #PPSBitungTerbaik



Pengaduan Melalui Media Elektronik : Twitter Humas_PPS Bitung



Pengaduan Melalui Informasi Banner Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)